

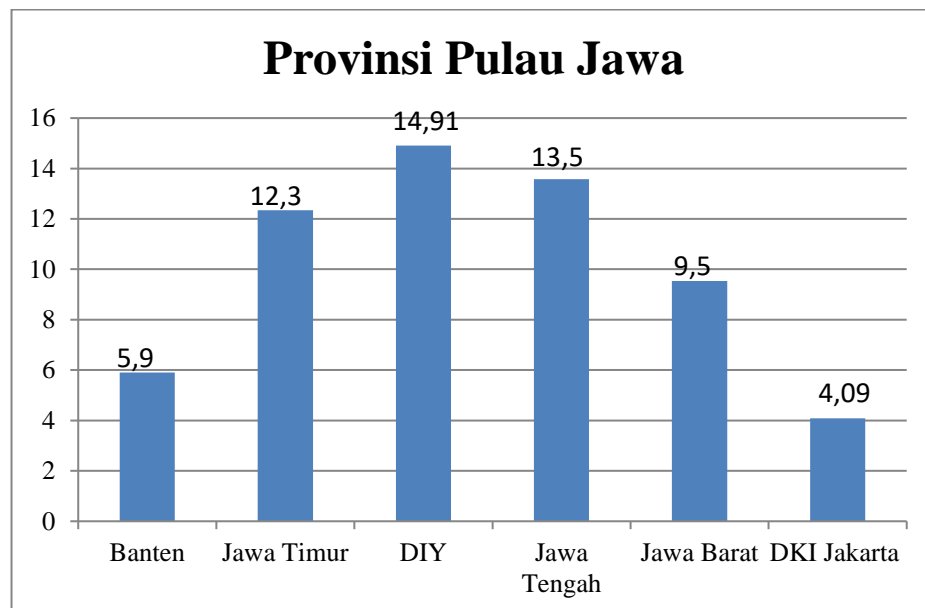
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia tentunya menjadi masalah ekonomi yang sampai saat ini belum dapat dituntaskan hampir di setiap daerah. Hal ini juga dikarenakan kemiskinan bersifat multidimensi. Sehingga pemerintah selalu mengkaji kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi masalah kemiskinan di berbagai daerah. Berbagai program juga sudah dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu seperti program bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH), penyediaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Padahal apabila program pemerintah dapat efektif dalam mengentas kemiskinan, maka hal ini akan mengurangi angka kemiskinan yang terjadi diberbagai daerah.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang paling tinggi di antara provinsi di Pulau Jawa. Padahal Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian di Indonesia yang memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan daerah di luar Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini.



Sumber : BPS Yogyakarta, 2017

Gambar 1. 1 Presentase Penduduk Miskin menurut Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2015

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa presentase penduduk miskin di Pulau Jawa, di Provinsi DIY sangat tinggi di antara provinsi yang lain yaitu sebesar 14,91 persen. Pada posisi kedua ditempati oleh Jawa Tengah yaitu sebesar 13,5 persen. Selanjutnya presentase penduduk miskin yaitu 12,3 persen ditempati oleh Jawa Timur. Provinsi Jawa Barat dan Banten sebesar 9,5 persen dan 5,9 persen. Sedangkan presentase penduduk miskin di DKI Jakarta yang paling rendah yaitu sebesar 4,0 persen.

Selain itu, apabila dilihat dari kurun waktu sepuluh terakhir seperti tabel 1.1, tingkat kemiskinan di DIY mengalami fluktuatif dari tahun 2006 hingga tahun 2015. Berdasarkan data *series*, jumlah penduduk miskin terlihat meningkat beberapa kali seperti pada tahun 2011-2012, dan 2015. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini dikarenakan terjadinya harga

barang menjadi naik (inflasi) yang cukup tinggi pada harga komoditas pangan dan bahan bakar minyak, listrik, dan gas. Kenaikan harga tersebut tentunya berpengaruh pula pada kenaikan harga barang dan jasa, sehingga terjadi peningkatan pada tingkat kemiskinan (Sumber data BPS, 2016).

Tabel 1. 1
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin pada tahun 2006-2016

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Presentase Penduduk Miskin (persen)
2006	648,70	19,15
2007	633,50	18,99
2008	616,28	18,32
2009	585,78	17,23
2010	577,30	16,83
2011	562,70	16,08
2012	568,35	16,05
2013	553,07	15,43
2014	544,87	15,00
2015	550,23	14,91
2016	494,94	13,34

Sumber: BPS Yogyakarta, 2017

Kemiskinan yang terjadi disuatu wilayah tentunya didorong oleh beberapa faktor salah satunya seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, kebijakan penetapan upah minimum dan juga

inflasi. Pertumbuhan ekonomi adalah faktor makro yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari keberhasilan tingkat pembangunan nasional maupun daerah. Pembangunan dengan tepat sasaran akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kondisi meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada ketersediaan lapangan kerja yang tentunya akan mengurangi penduduk miskin disuatu wilayah tersebut.

Keberhasilan dalam pengukuran pembangunan bukan hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tetapi juga mencakup kualitas hidup manusianya. Karena dengan mempunyai kualitas hidup manusia yang baik maka akan mengurangi tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Dengan meningkatnya kualitas hidup manusia yaitu peningkatan pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak, yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka akan meningkatkan produktifitas masyarakat, sehingga akan menyebabkan meningkatnya pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Namun jika kebijakan upah yang diterapkan oleh pemerintah tergolong rendah, maka akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Karena upah yang rendah tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup minimum masyarakat maka perlu adanya kebijakan penetapan upah. Kebijakan penetapan upah ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan agar pekerja tidak dieksploitasi secara berlebihan dalam bekerja, selain itu agar pekerja

mendapatkan upah untuk memenehi kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan hidup minimum. Tujuan utama dalam menetapkan standar upah adalah untuk menjaga daya beli masyarakat atau pekerja akibat adanya inflasi. Dengan tujuan tersebut diharapkan kebutuhan hidup minimum masyarakat akan terpenuhi. Jika kebutuhan hidup minimum dapat terpenuhi, maka kesejahteraan pekerja meningkatkan terbebas dari masalah kemiskinan (Marini, 2016: 112).

Inflasi yang tinggi di suatu wilayah tentunya akan berdampak meningkatnya kemiskinan. Karena harga-harga barang di pasaran mengalami kenaikan, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Inflasi sendiri mempunyai dampak positif dan negatif tergantung parah atau tidaknya tingkat inflasi. Inflasi dapat dikatakan positif jika inflasi tersebut dalam keadaan ringan yang dapat mendorong seseorang untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi serta meningkatkan pendapatan nasional. Sedangkan inflasi dalam keadaan parah yaitu ketika terjadi inflasi yang tidak terkendali, keadaan perekonomian menjadi lesu dan kacau. Sehingga menyebabkan inflasi harus dihindari. Di samping itu inflasi juga menyebabkan akibat buruk ke dalam perekonomian (Windra, 2016).

Di dalam Islam, kemiskinan juga menjadi masalah yang ingin dituntaskan. Islam tak mengenal kata kemiskinan akan tetapi menyandingkan kata miskin (orang yang kekurangan) dan fakir (orang yang sangat kekurangan). Dalam mengurangi penduduk termasuk miskin

dan fakir maka ajaran Islam memerintahkan untuk memberantas kemiskinan melalui persuasif seperti memberikan zakat, infak dan sedekah maupun melalui preventif seperti berusaha dan bekerja keras (Djalaluddin, 2014: 159).

Adapun penelitian terdahulu mengenai studi pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, upah minimum, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian terdahulu oleh Windra, Marwoto dan Rafani tahun 2016 dengan judul *Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“STUDI PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, UPAH MINIMUM DAN INFLASI (TINJAUAN KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2016)”**.

B. Rumusan Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang banyak dikunjungi wisatawan asing dan lokal karena memiliki tempat wisata yang banyak untuk dikunjungi. Selain itu, adanya universitas-universitas dengan kualitas baik menjadikan DIY sebagai tempat mencari ilmu untuk masyarakat di luar DIY, sehingga dijuluki sebagai kota pelajar.

Akan tetapi walaupun sebagai pusat wisata dan kota pelajar DIY masih saja mempunyai tingkat kemiskinan yang tinggi diantara provinsi di Pulau Jawa.

Peran Pemerintah DIY dalam menetapkan kebijakan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilakukan dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, upah minimum dan inflasi. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan bertambahnya ketersediaan lapangan kerja. Tingginya angka indeks pembangunan manusia maka akan berpengaruh terhadap tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan kenaikan upah minimum di DIY karena dengan naiknya upah minimum maka diharapkan masyarakat dapat mencukupi kebutuhan hidup minimum. Tetapi pemerintah juga perlu memerhatikan inflasi, karena kenaikan inflasi akan berpengaruh pula berkurangnya daya beli masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis ingin mencari variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Variabel-variabel tersebut yaitu pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, upah minimum dan inflasi. Penulis akan merumuskannya sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2016?
2. Apakah pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2016?

3. Apakah pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2016?
4. Apakah pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2016
2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2016
3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2016
4. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2016

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan diatas, maka penelitian ini terbatas pada:

1. Objek penelitian ini di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Periode penelitian ini adalah 2011 sampai dengan 2016.
3. Variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan kemiskinan. Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini

terbatas pada pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, upah minimum dan inflasi.

E. Kegunaan

Berdasarkan tujuan penelitian yang dipaparkan diatas, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat untuk semua pihak, diantaranya :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bagi pembaca dan pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan informasi kepada semua pihak yang akan melakukan penelitian tentang kondisi kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan atau masukan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan yang efektif untuk mengurangi penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam lima bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini memuat tentang penjelasan yang melatar belakangi penelitian ini secara umum, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan pustaka dan kerangka teori, pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang dilihat dari penelitian terdahulu dan juga kerangka teori yang menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan penelitian.

Bab III : Metode penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian dan jenis data, objek penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil dan pembahasan, pada bab ini menjelaskan tentang hasil analisis dari pengolahan data, baik analisis data secara deskriptif maupun analisis data hasil pengujian hipotesis. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap hasil analisis pengolahan data dengan kerangka teori serta kondisi nyata selama periode penelitian.

Bab V : Penutup, pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penelitian yang didapat dari hasil dan pembahasan. Selain itu pada bab ini, penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.